

Mekanisme pemberian dan Sistem Pengelolaan Paket Bantuan Perikanan bagi Pemberdayaan Nelayan Kota Ambon.

Lolita Tuhumena^{1*}, Sara Umbekna¹, Lalu P. I. Agamawan¹, Eygner Talakua², Leopold A. Tomasila³, Yofreds Tanamal⁴, Winda A. F. B⁵, Nicea R. Paranoan⁶,

¹Program Studi Ilmu Perikanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Cenderawasih. Jln. Camp Wolker, Yabansai, Kota Jayapura, Papua 99224

²Program Studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura. Jln. Ir. M. Putuhena, Poka, Kota Ambon, Maluku 97233

³Program Studi Perikanan Tangkap, Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku. Waiheru, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku 97233

⁴Program Studi Budidaya Ikan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku. Waiheru, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku 97233

⁵Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Cenderawasih. Jln. Camp Wolker, Yabansai, Kota Jayapura, Papua 99224

⁶Program Studi Statistik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Cenderawasih. Jln. Camp Wolker, Yabansai, Kota Jayapura, Papua 99224

*E-mail korespondensi: lolituhumena@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima : 24 November 2022
Disetujui : 01 Desember 2022
Terbit Online : 30 Desember 2022

Key Words:

*Mechanism
Management System
Assistance Package
Fisherment
Empowerment*

ABSTRACT

Maluku as an archipelago province with the highest potential for fishery in Indonesia, where people occupy more than 75 percent of coastal areas and islands which still live below the poverty line. The government has made various efforts to alleviate poverty of coastal communities by providing aid packages through policy to provide capture fishery assistance package, but the results obtained have not been maximized. In addition, there has not been an in-depth evaluation of the impact of providing aid package to fisherman in Ambon City. This study aims to analyze the characteristics of recipients of aid packages and analyze the impact of policies on fishery assistance packages. This study was conducted in May - June 2019. The data of this study consists of primary and secondary data. Sampling was done by total sampling, which amounted to 44 respondents and method used is Descriptive Statistic and Editing, Scoring, Tabulating, Processing and Cleaning. Based on the results of the study there were 12 characteristics of respondents which are divided into 4 social characteristics and 8 economics that receive of assistance package in Ambon City and then the mechanism of giving and managing fishery assistance package in the form of tonda fishing rod (1.5 GT) was not good.

PENDAHULUN

Pembangunan Kelautan dan Perikanan secara umum merupakan bagian dari pembangunan nasional dan posisinya secara khusus di provinsi Maluku sebagai sektor unggulan dalam rangka menggerakkan roda perekonomian daerah. Posisinya sebagai sektor unggulan diharapkan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat yang eksistensinya menempati lebih dari 75 persen wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku. Dalam perencanaan pembangunan Maluku yang telah memasuki tahap pemantapan, kondisi marjinal pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil harus dapat direduksi melalui kontribusi pembangunan di sektor kelautan dan perikanan (DKP Provinsi Maluku, 2017).

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai penyangga utama Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus langsung bidang kelautan dan perikanan di provinsi Maluku sudah cukup banyak

berkontribusi dalam program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir di Maluku. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjawab kondisi ini adalah dengan memberikan paket bantuan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan. Upaya ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 bahwa salah satu kewenangan wajib dinas adalah pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dengan tolak ukurnya adalah pemberian paket bantuan sarana penangkapan ikan.

Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 199.660.703.401,- yang bersumber dari dana APBN dan APBD berupa pengadaan sarana prasarana budidaya, pengolahan dan bantuan perikanan tangkap kepada pebudidaya ikan dan

nelayan di sebelas kabupaten/kota termasuk kota Ambon, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir.

Untuk Kota Ambon total bantuan perikanan tangkap dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp. 32.984.000.000,- yang bersumber dari dana APBD, berupa sarana penangkapan ikan pancing tonda ukuran 1,5 GT sebanyak 44 unit, kapal *purse seine* 15 GT sebanyak 6 unit, dan kapal *purse seine* ukuran 30 GT sebanyak 3 unit. Paket bantuan tersebut terdistribusi kepada nelayan di Kota Ambon di lima kecamatan, yang terdiri dari : Kecamatan Nusaniwe sebanyak 35 paket, Kecamatan Teluk Ambon sebanyak 9 paket, Kecamatan Leitimur Selatan sebanyak 5 paket, Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Baguala masing-masing sebanyak 2 paket.

Setiap tahunnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui kebijakan pemberian paket bantuan perikanan tangkap di Kota Ambon dengan harapan dapat meningkatkan hasil tangkapan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun sayangnya berbagai usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah belum mampu menekan angka kemiskinan di Provinsi Maluku. Atas dasar tersebut maka dindikasikan bahwa terdapat permasalahan dalam proses pemberian paket bantuan perikanan tangkap kepada masyarakat. Salah satu asumsi dari permasalahan

tersebut yaitu belum banyaknya pengevaluasian terhadap kesesuaian bentuk bantuan dengan karakteristik penerima paket bantuan serta mekanisme pemberian dan sistem pengelolaan dalam pemberdayaan nelayannya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku masih kekurangan data terkait tingkat keberhasilan dari kebijakan pemberian paket bantuan perikanan tangkap yang telah diberikan kepada masyarakat nelayan di pesisir Kota Ambon. Saat ini belum adanya evaluasi mendalam terhadap dampak pemberian paket bantuan kepada nelayan di Kota Ambon sebagai barometer keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kota Ambon. Kondisi inilah yang melatarbelakangi untuk melakukan penelitian tentang karakteristik nelayan yang menerima Paket Bantuan Perikanan Tangkap di Kota Ambon, hal dikarenakan Kota Ambon termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI 714) dengan potensi perikanan sebesar 431.069 ton/tahun. WPP-NRI 714 (Laut Banda) merupakan wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan tangkap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Ambon selama bulan Mei sampai dengan Juni 2019. Lokasi penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Lokasi Penelitian mekanisme pemberian dan sistem pengelolaan Paket bantuan perikanan bagi Nelayan kota Ambon

Menurut [Sujarweni \(2015\)](#), teknik sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel adalah sampel jenuh atau menurut [Sugiyono \(2017\)](#) disebut dengan *sampling total*. Metode penelitian untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui Pemberian Paket Bantuan Perikanan Tangkap di Kota Ambon akan dilakukan ini adalah dengan cara :

1. Teknik Wawancara (*interview*)
2. Teknik Pengamatan (*observasi*)
3. Teknik Dokumentasi

Untuk mengetahui hubungan karakteristik sosial dan ekonomi penerima paket bantuan perikanan tangkap di Kota Ambon akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis statistik deskriptif yang lebih berpusat pada penjelasan mengenai karakteristik data dan biasanya disajikan dalam ukuran-ukuran statistik sederhana melalui tabel dan diagram *pie*.

Selain itu untuk mekanisme pemberian bantuan dianalisis dengan cara *Editing, Scoring, Tabulating, Processing dan Cleaning*.

1. *Editing* dilakukan dengan cara mengecek kembali kelengkapan dan kejelasan jawaban dan data dari responden.
2. *Scoring* melakukan penilaian data dengan memberikan skor pada pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan responden
3. *Coding* dilakukan dengan memberikan kode langsung pada lembar kuisioner data untuk mempermudah mengolah data jawaban
4. *Tabulating* dilakukan dengan mengelompokan data dalam bentuk tabel menurut sifat-sifat yang dimilikinya sesuai dengan tujuan penelitian agar selanjutnya mudah dianalisa
5. *Processing*, menerjemahkan jawaban dari responden ke dalam bentuk angka yang bertujuan untuk mempermudah proses analisis
6. *Cleaning*, melakukan pemeriksaan kembali terhadap semua data yang sudah dientri pada proses sebelumnya meliputi *Coding* dan *Scoring*. Bertujuan untuk meminimalisir tingkat kesalahan dalam proses pengentrian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Penerima Paket Bantuan

Karakteristik penerima paket bantuan sarana penangkapan ikan pancing tonda (1,5 GT) di Kota Ambon terwakili dan tergambar oleh karakteristik responden penerima paket bantuan sarana penangkapan ikan pancing tonda (1,5 GT) pada Gambar 2. Terdapat 12 karakteristik responden yang terbagi atas 4 karakteristik sosial dan 8 karakteristik ekonomi dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Karakteristik sosial

a. Karakteristik responden berdasarkan umur

Umur responden didekati dengan pembagian umur berdasarkan produktifitas kerja. Gambar 5 menunjukkan sebagian besar (42 atau 95,45%) responden berumur produktif, dan hanya 1 responden yang tidak produktif.

b. Karakteristik responden berdasarkan status perkawinan

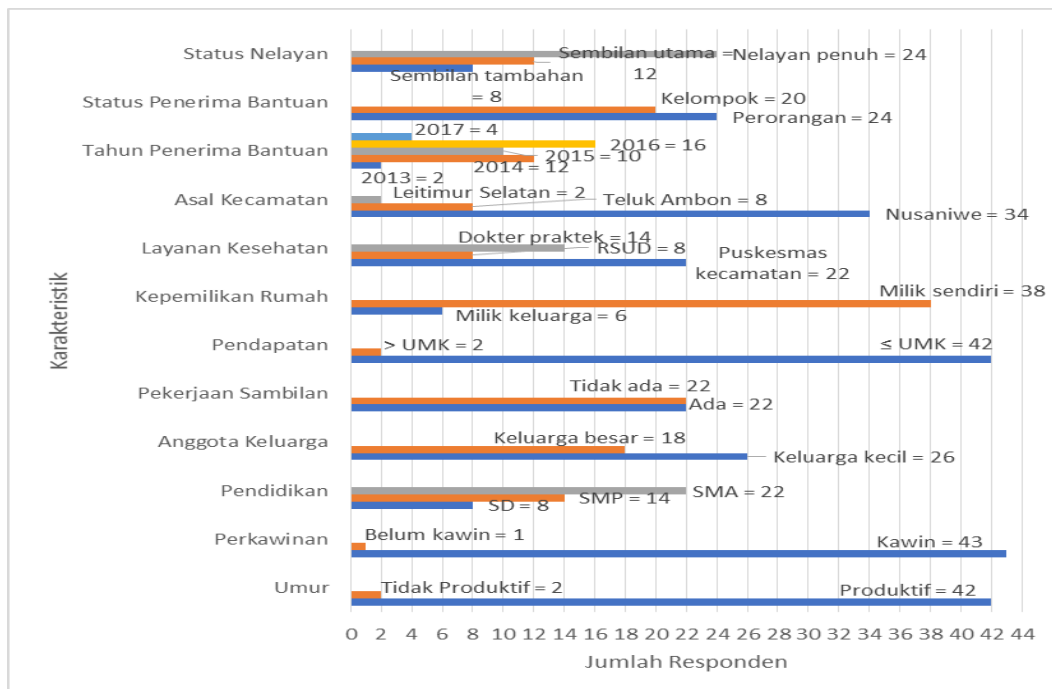
Status perkawinan responden didekati dengan kategori kawin dan belum kawin. Gambar 5 menunjukkan sebagian besar (43 atau 97,73%) responden dalam status kawin, dan hanya 1 responden yang belum kawin.

c. Karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan

Jenjang pendidikan responden didekati dengan jenjang pendidikan formal sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Gambar 2. menunjukkan sebagian besar (22 atau 50,00%) responden lulusan sekolah menengah atas (SMA), sedangkan sebagian kecil terbagi atas lulusan sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah dasar (SD).

d. Karakteristik responden berdasarkan jumlah anggota keluarga

Jumlah anggota keluarga responden didekati dengan kategori keluarga berencana (KB), yakni keluarga kecil (4 orang anggota keluarga) dengan jumlah tanggungan 3 orang, dan keluarga besar (keluarga tidak berencana, lebih dari 4 orang anggota keluarga) dengan jumlah tanggungan lebih dari 3 orang. Gambar 2 menunjukkan sebagian besar (26 atau 59,09%) responden yang merupakan kepala keluarga memiliki keluarga kecil, dan 9 responden lainnya memiliki keluarga besar.



Gambar 2. Karakteristik Responden Penerima Paket Bantuan Perikanan Nelayan Kota Ambon

Karakteristik sosial menunjukkan bahwa responden masih tergolong umur produktif, telah menikah, berpendidikan terakhir SMA, dan berkeluarga kecil. Dalam umur produktif (15 - 64 tahun) secara fisik responden mampu melakukan aktivitas penangkapan ataupun mengelola usahanya dengan baik. Menurut [Halim \(2013\)](#), usia produktif diyakini sebagai pengalaman melaut yang optimal karena ketahanan fisik nelayan mampu menghadapi kondisi alam yang buruk.

Pada usia lebih dari 55 tahun nelayan memiliki keterbatasan kemampuan secara fisik dikarenakan daya tahan tubuh yang menurun. Dominasi responden berjenjang pendidikan SMA menunjang keterampilan yang dimiliki sebagai nelayan dalam menjalankan usaha penangkapan ikan. Menurut [Agunggunanto \(2011\)](#), pendidikan berpengaruh positif terhadap pendapatan nelayan. Ini disebabkan karena semakin tinggi pendidikan nelayan maka kemampuan (*skill*) yang dimiliki juga tinggi, bukan hanya pada *skill* melaut tetapi juga pada penguasaan teknologi/pengetahuan dan manajemen usaha. Salah satu hal pendorong responden berusaha adalah status perkawinan dan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Menurut [Rahim \(2011\)](#), jumlah tanggungan keluarga berpengaruh nyata positif terhadap pendapatan usaha tangkap nelayan, artinya dengan adanya peningkatan jumlah tanggungan nelayan, maka semakin meningkat pendapatan nelayan dari usaha tangkapnya, bertambahnya tanggungan

keluarga akan memotivasi nelayan dalam mencari nafkah sebagai tulang punggung keluarga.

Sesuai dengan karakteristik sosial ini, teridentifikasi bahwa fokus kebijakan pemberian paket bantuan sarana penangkapan ikan pancing tonda (1,5 GT) di Kota Ambon terkonsentrasi pada nelayan berumur produktif, telah menikah, berpendidikan terakhir SMA, dan berkeluarga kecil. Konsentrasi pada karakteristik sosial menggambarkan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki nelayan yang telah baik sebagai salah satu modal sosial. Menurut [Kusnadi \(2009\)](#) modal sosial sebagai sesuatu yang merujuk pada dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, serta norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat.

2. Karakteristik ekonomi

a. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan sambilan

Pekerjaan sambilan/tambahan responden didekati kategori ada dan tidak ada, dan jika ada termasuk sambilan utama atau sambilan tambahan. Pada (Gambar 2) terdapat perbandingan yang sama (masing-masing 22 atau 50,00%) responden yang memiliki pekerjaan sambilan (ada) dan tidak memiliki pekerjaan sambilan.

b. Karakteristik responden berdasarkan pendapatan

Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan sebelum menjadi nelayan, diukur melalui pendekatan lebih dari atau kurang dari/sama dengan upah minimum Kota Ambon (UMK) sebesar Rp 2.250.000,-/bulan. Gambar 5 menunjukkan

sebelum menjadi nelayan sebagian besar responden (42 atau 95,45%) berpendapatan kurang dari atau sama dengan (\leq) UMK dan hanya hanya 2 responden dengan pendapatan lebih dari ($>$) UMK.

c. Karakteristik responden berdasarkan kepemilikan rumah

Kepemilikan rumah responden didekati dengan kategori rumah milik keluarga atau rumah milik sendiri. Gambar 2 menunjukkan sebagian besar (38 atau 86,36%) responden memiliki rumah sendiri, dan hanya 6 responden dengan rumah milik keluarga (tinggal bersama keluarga besar).

d. Karakteristik responden berdasarkan layanan kesehatan yang digunakan.

Layanan kesehatan yang digunakan responden didekati dengan kategori layanan kesehatan yang digunakan responden atau anggota keluarga untuk tujuan berobat yakni mantri/suster/bidan desa, pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) kecamatan, rumah sakit umum daerah (RSUD), rumah sakit swasta, dan dokter praktek. Gambar 2 menunjukkan sebagian besar (22 atau 50,00%) responden menggunakan layanan PUSKESMAS kecamatan untuk berobat, kemudian 14 responden menggunakan layanan dokter praktek dan 8 responden menggunakan RSUD.

e. Karakteristik responden berdasarkan status penerima bantuan

Status penerima bantuan oleh responden didekati dengan kategori perorangan atau kelompok. Gambar 2 menunjukkan sebagian (24 atau 54,55%) responden berstatus nelayan perorangan, dan 20 responden atau 45,55% lainnya tergabung dalam kelompok nelayan.

f. Karakteristik responden berdasarkan status nelayan

Karakteristik responden berdasarkan status nelayan berhubungan dengan karakteristik pekerjaan sambilan/ tambahan. Kategori status nelayan didekati dengan nelayan penuh (tidak ada pekerjaan sambilan/tambahan), nelayan sambilan utama, dan nelayan sambilan tambahan. Gambar 2 menunjukkan sebagian besar (24 atau 54,55%) responden merupakan nelayan penuh. Terdapat salah satu nelayan memiliki pekerjaan sambilan/tambahan selain melakukan penangkapan ikan di laut juga bekerja sebagai nelayan pembudidaya ikan air tawar, sehingga dikategorikan sebagai nelayan penuh, sedangkan status responden sebagai nelayan sambilan utama dan tambahan hanya berjumlah 12 dan 8 orang.

g. Karakteristik responden berdasarkan tahun penerima bantuan

Tahun penerima bantuan adalah tahun dimana bantuan diberikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku (DKP Provinsi

Maluku). Gambar 2 menunjukkan tidak ada responden yang dominan menerima bantuan pada tahun tertentu, namun berturut-turut terbanyak pada tahun 2016, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2013, dan tahun 2017.

h. Karakteristik responden berdasarkan asal kecamatan

Kota Ambon memiliki 5 kecamatan, jumlah kecamatan tersebut digunakan dalam kategori asal kecamatan responden penerima bantuan. Gambar 5 menunjukkan pemberian bantuan terbanyak kepada responden di Kecamatan Nusaniwe (34 atau 72,73%), kemudian Kecamatan Teluk Ambon sebanyak 8 nelayan dan di Kecamatan Leitimur Selatan sebanyak 2 nelayan.

Karakteristik ekonomi menunjukkan bahwa responden memiliki dan tidak memiliki pekerjaan sampingan/tambahan, pendapatan sebelum menjadi nelayan kurang dari UMK, memiliki rumah sendiri, memilih ke PUSKESMAS kecamatan untuk berobat, terbanyak berstatus nelayan perorangan dan nelayan penuh, masing-masing menerima bantuan dari tahun 2013 hingga tahun 2017, dan terbanyak berasal dari Kecamatan Nusaniwe.

Menurut [Kusnadi \(2009\)](#), untuk bisa bertahan dan meningkatkan ekonomi rumah tangga, rumah tangga nelayan harus mengembangkan strategi-strategi ekonomi yang beragam di luar sektor penangkapan, seperti berdagang, bertani dan berternak. Mengingat kepemilikan rumah sendiri dan tujuan berobat di PUSKESMAS kecamatan oleh responden menunjukkan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan, disamping kebutuhan utama (pangan).

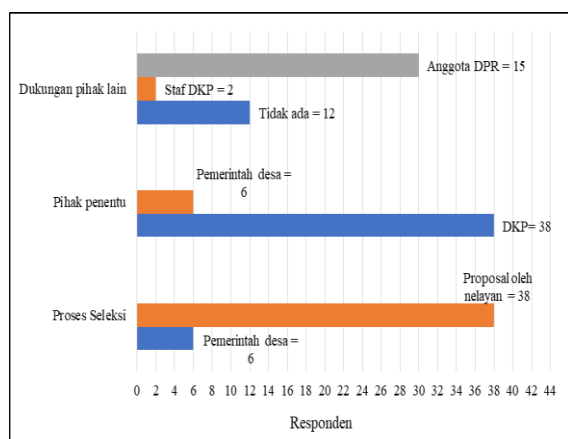
Kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemberian paket bantuan perikanan tangkap (pancing tonda 1,5 GT) di Kota Ambon yang berlangsung dari tahun 2013 hingga tahun 2017 telah membentuk lebih banyak nelayan perseorangan dan menciptakan lebih banyak nelayan berstatus nelayan penuh dan terbanyak berasal dari Kecamatan Nusaniwe. Sasaran pada kecamatan ini dinilai tepat. karena menurut [Kurniasari dan Yuliati \(2014\)](#), jika dilihat dari jumlah nelayan dan rumah tangga perikanan (RTP) di Kota Ambon maka Kecamatan Nusaniwe merupakan kecamatan dengan jumlah nelayan dan RTP terbanyak di Kota Ambon.

Secara keseluruhan dari karakteristik sosial dan karakteristik ekonomi penerima bantuan yang terwakili oleh responden di atas, menggambarkan pentingnya kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemberian paket bantuan perikanan tangkap (pancing tonda 1,5 GT) di Kota

Ambon yang tepat sasaran yakni masyarakat nelayan. Pada perspektif ekonomi modal manusia dapat diartikan sebagai salah satu aset yang menentukan aktifitas ekonomi khususnya dalam menghasilkan barang dan jasa. Menurut [Ramadhan, dkk \(2017\)](#), modal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tidak hanya berbentuk *tangible* dan material. Modal sosial yang berbentuk *intangible* mempengaruhi bahkan dianggap menentukan dalam pertumbuhan ekonomi dibandingkan modal lainnya (sumber daya alam, manusia dan fisik). Hal ini dikarenakan dalam modal sosial, aktor mengatur dirinya untuk mencapai tujuan.

Mekanisme Pemberian Bantuan dan Pengelolaan Paket Bantuan

Mekanisme pemberian bantuan sarana penangkapan ikan pancing tonda (1,5 GT) di Kota Ambon dinilai dari 3 indikator yakni, proses seleksi, pihak penentu perolehan bantuan, dan ada tidaknya dukungan pihak lain. Sistem pengelolaan paket bantuan dinilai dari 2 indikator yakni pendataan awal sebelum paket diberikan dan kunjungan *monitoring* dan evaluasi (monev) dari DKP Provinsi Maluku, sehingga terdapat 5 indikator dalam mekanisme dan pengelolaan paket bantuan yang dinilai langsung oleh responden penerima paket bantuan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pemberdayaan nelayan pancing tonda (1,5 GT) di Kota Ambon.



Gambar 3. Mekanisme Pemberian Bantuan Perikanan Nelayan Kota Ambon

2. Pengelolaan paket bantuan

a. Pendataan awal

Penilaian pengelolaan paket bantuan melalui indikator pendataan awal pemberian bantuan dikategorikan atas 2 yakni, ada dan tidak ada. Gambar 4 menunjukkan sebagian besar (26 atau 59,09%) responden didata awal oleh DKP Provinsi

1. Mekanisme pemberian bantuan

a. Proses seleksi

Penilaian indikator proses seleksi dalam mekanisme pemberian bantuan dikategorikan atas 3 yakni, berdasarkan mata pencaharian sebagai nelayan, pembuatan proposal oleh nelayan, dan ditentukan oleh pemerintah desa/negeri. Gambar 6 menunjukkan sebagian besar (38 atau 86,36%) responden membuat proposal, dan hanya 6 responden ditentukan oleh pemerintah desa/negeri.

b. Pihak penentu perolehan bantuan

Penilaian indikator pihak penentu perolehan bantuan dalam mekanisme pemberian bantuan dikategorikan atas 3 yakni, petugas penyuluh lapangan (PPL) kecamatan, bidang tangkap DKP Provinsi Maluku, dan pemerintah desa/negeri. Gambar 3 menunjukkan sebagian besar (38 atau 86,36%) responden memperoleh bantuan ditentukan dari pihak bidang tangkap DKP Provinsi Maluku, dan hanya 3 responden melalui pihak pemerintah desa/negeri.

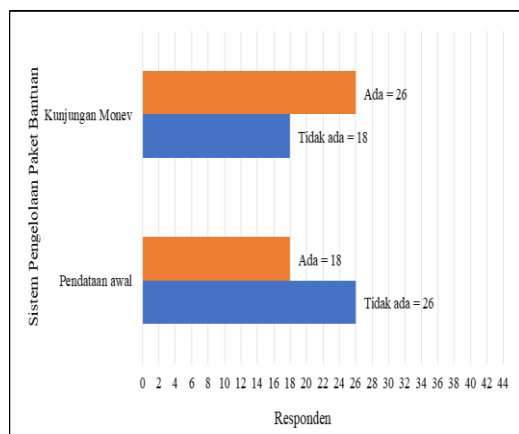
c. Dukungan pihak lain

Penilaian indikator dukungan pihak lain dalam mekanisme pemberian bantuan dikategorikan atas 4 yakni, tidak ada, staf DKP Provinsi Maluku, pegawai kantor gubernur, anggota DPRD Provinsi Maluku, dan tokoh politik lainnya. Gambar 3 menunjukkan sebagian besar (30 atau 68,18%) responden mendapat dukungan dari anggota DPRD Provinsi Maluku, 12 responden tidak ada dukungan, dan hanya 2 dukungan dari staf DKP Provinsi Maluku.

Maluku sebelum paket bantuan diberikan, dan 18 responden tidak didata.

b. Kunjungan monev DKP Provinsi Maluku

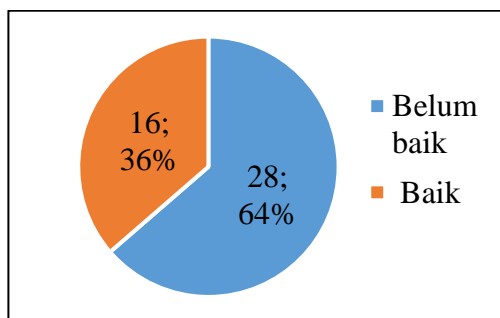
Penilaian pengelolaan paket bantuan melalui indikator kunjungan monev dari DKP Provinsi Maluku pendataan dikategorikan atas 2 yakni, ada dan tidak ada. Gambar 4 menunjukkan sebagian (26 atau 59,09%) responden dikunjungi oleh DKP Provinsi Maluku untuk melakukan monev, dan 18 responden tidak dikunjungi.



Gambar 4. Sistem Pengelolaan Paket Bantuan Perikanan Nelayan Kota Ambon

Berdasarkan penilaian atas 5 indikator tersebut di atas, maka sebagian besar (28 atau 63,64%) responden menilai mekanisme pemberian bantuan dan pengelolaan paket bantuan penangkapan ikan pancing tonda (1,5 GT) di Kota Ambon adalah “belum baik”. Sedangkan 16 atau 36,36% responden menilai mekanisme sudah “baik” (Gambar 5). Baiknya mekanisme pemberian bantuan dan pengelolaan paket bantuan karena sebagian besar responden/nelayan mampu membuat proposal dan kunjungan monev yang dilakukan DKP Provinsi Maluku.

Menurut [Makatita \(2013\)](#), kemampuan nelayan membuat proposal menunjukkan inisiatif untuk pemberdayaannya, sedangkan menurut aturan DJPT KKP (2017) syarat bantuan sarana penangkakan ikan dapat dalam bentuk perorangan/nelayan dengan kriteria tertentu, pendataan dapat dilakukan melalui dinas yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota, kemudian pemantauan/evaluasi dan pembinaan operasional dilakukan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan provinsi.



Gambar 5. Penilaian Mekanisme Pengelolaan Paket Bantuan Perikanan Nelayan Kota Ambon

Belum baiknya mekanisme pemberian bantuan dan pengelolaan paket bantuan karena sebagian besar responden (86,36% dan 68,18%) masih dibantu oleh pihak-pihak tertentu/terkait yakni, bidang tangkap DKP Provinsi Maluku dan anggota DPRD Provinsi Maluku dalam perolehan paket bantuan, dan belum maksimalnya pendataan awal sebelum pemberian paket bantuan (26 atau 59,09% responden tidak didata).

Seharusnya tidak ada campur tangan pihak penentu/pihak lain dalam perolehan paket bantuan. Menurut DJPT KKP (2017), penetapan penerima dan pemaketan harus melalui alur pengadaan paket bantuan sarana penangkapan ikan, yakni melalui tim seleksi, tim teknis, pokja pengadaan, dan tim monitoring dan PPHP, dan ditetapkan di PPK (pejabat pembuat komitmen).

Dengan demikian dalam mekanisme pemberian dan pengelolaan paket bantuan sarana penangkapan ikan pancing tonda (1,5 GT) di Kota Ambon oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku “tidak” berpedoman dan “tidak” mengikuti alur pengadaan paket bantuan sarana penangkapan ikan dalam petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan wawancara langsung dengan Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Maluku, mekanisme pemberian bantuan dan pengelolaan paket bantuan hanya berpedoman pada urusan dan kewenangan wajib Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, khusus untuk bidang perikanan tangkap tentang pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dalam dokumen rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 ([DKP Provinsi Maluku, 2017](#)).

Tidak maksimalnya pendataan awal akan mengganggu mekanisme pemberian paket secara keseluruhan. Menurut DJPT KKP (2017), dalam tahapan usulan mandiri penerima paket bantuan terdapat 3 tahapan seleksi, dan pada tahap ke 2 terdapat proses reuiv lapangan dengan form pendataan yang harus diisi. Sehingga form pendataan ini akan digunakan pada tahap *review* dan identifikasi melalui survei lapangan (kembali) untuk memastikan kesesuaian usulan dengan kelengkapan persyaratan administrasi dan kemampuan teknis calon penerima. Untuk itu, 13 atau 59,09% responden yang tidak didata memiliki persyaratan administrasi dan kemampuan teknis merupakan hal yang belum lengkap dalam suatu mekanisme pemberian paket bantuan sarana penangkapan ikan pancing tonda (1,5 GT) di Kota

Ambon oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku.

Makatita (2013), pemberian paket bantuan perikanan tangkap hendaknya mengikuti petunjuk teknis yang tersedia dan penerimaan bantuan di luar nelayan merupakan penyimpangan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Sehingga belum baiknya mekanisme pemberian bantuan dan pengelolaan paket bantuan sarana penangkapan ikan pancing tonda (1,5 GT) di Kota Ambon dibuktikan oleh tidak adanya petunjuk teknis dan adanya penyimpangan melalui intervensi pihak lain dalam mendukung pelolosan perimaan paket bantuan perikanan tangkap.

KESIMPULAN

Karakteristik sosial penerima paket bantuan perikanan tangkap pancing tonda 1,5 GT di Kota Ambon adalah tergolong umur produktif, telah menikah, berpendidikan SMA, dan berkeluarga kecil, sedangkan karakteristik ekonomi adalah sebagian memiliki dan tidak memiliki pekerjaan sampingan/tambahan, pendapatan sebelum menjadi nelayan kurang dari UMK, memiliki rumah sendiri, memilih ke PUSKESMAS kecamatan untuk berobat, terbanyak berstatus nelayan perorangan dan nelayan penuh, masing-masing menerima bantuan dari tahun 2013 hingga tahun 2017, dan terbanyak dari Kecamatan Nusaniwe. Oleh sebab itu sangat penting membuat kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemberian paket bantuan perikanan tangkap (pancing tonda 1,5 GT) yang tepat sasaran dan pemberian bantuan yang belum baik mekanismenya dikarenakan masih ada campur tangan pihak penentu/pihak lain dalam perolehan paket bantuan, dan belum maksimalnya pendataan awal sebelum pemberian paket bantuan.

Direkomendasikan untuk pembuatan kebijakan terkait pemberian paket bantuan perikanan tangkap pancing tonda 1,5 GT di Kota Ambon tersebut diatas perlu ditindak lanjuti oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku untuk perencanaan program/kegiatan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agunggunanto E. Y. 2011. Analisis Kemiskinan dan Pendapatan Keluarga Nelayan Kasus di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* Volume 1 Nomor 1 Juli 2011.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. 2017. Revisi Rencana STRategis Dinas Kelautan dan Perikanan Prvinsi Maluku tahun 2014-2019. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Ambon.

[DKP Provisi Maluku] Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. 2017. Revisi Rencana STRategis Dinas Kelautan dan Perikanan Prvinsi Maluku tahun 2014-2019. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Ambon.

[DJPT KKP] Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. Peraturan Direktur Jenderal Prikanan Tangkap Nomor 3/PER-DJPT/2017 tetang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2017. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

Halim D. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Masyarakat Nelayan Pantai di Kabupaten bantul Tahun 2012. *MODUS* Volume 25 Nomor 2 tahun 2013, ISSN: 0852-1875.

Kurniasari N. dan C. Yuliati. 2014. Tipologi Sosial Budaya Masyarakat Nelayan di Negeri Latuhalat, Ambon. *Buletin Riset Sosek Kelautan dan Perikanan* Volume 9 Nomor 1 tahun2014, pp 9 – 15.

Kusnadi ,2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lembaga Penelitian Universitas Jember dan Penerbit Ar-RuzzMedia, Yogyakarta.

Makatita R. 2013. Kebijakan Pemberian Paket Bantuan PerikananTangkap Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus di Kabupaten Maluku Tengah). Tesis pada Program Pascasarjana Prgram Studi Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura, Ambon.

Rahim A. 2011. Analisis Pendapatan Usaha Tangkap Nelayan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Wilayah Pesisir Pantai Sulawesi Selatan. *Jurnal Sosek Kelautan dan Perikanan* Volume 6 Nomor 2 tahun 2011, pp 236 – 247.

- Ramadhan A, C. Yuliati, dan S. Koeshendrajana. 2017. Indeks Sosial Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Indonesia. *Jurnal Sosek Kelautan dan Perikanan* Volume 12 Nomor 2 Desember tahun 2017, pp 235 – 253.
- Sugiyono. 2017. *Statistik Untuk Penelitian*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni V. W. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta